

ISBN 978-979-3450-14-8

PROSIDING SEMINAR

Pemberdayaan Petani Melalui Informasi dan Teknologi Pertanian

KP Mojosari, 16 Juli 2008



Kerjasama

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOI PERTANIAN JAWA TIMUR

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

Dan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

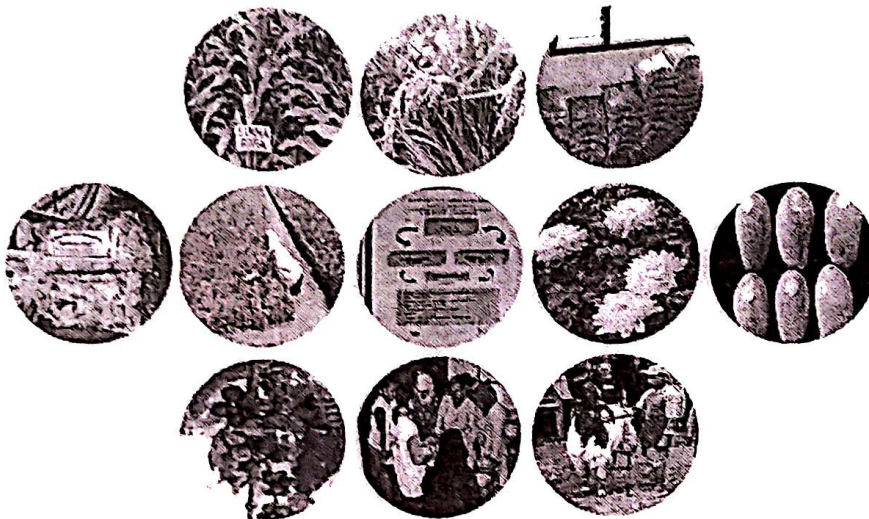
2008

ISBN 978-979-3450-14-8

PROSIDING SEMINAR

Pemberdayaan Petani Melalui Informasi dan Teknologi Pertanian

KP Mojosari, 16 Juli 2008



Kerjasama

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOI PERTANIAN JAWA TIMUR

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

Dan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

2008

ISBN 978-979-3450-14-8

Prosiding Seminar

Pemberdayaan Petani Melalui Informasi dan Teknologi Pertanian

KP Mojosari, 16 Juli 2008

Penyunting

Ketua : Dr. Sudarmadi Purnomo
Anggota : Dr. Moh. Cholil Mahfud
Dr. Djoko Koestiono
Dr. Kliwon Hidayat
Dr. Dini Hardini
Dr. Herman Subagio



Kerjasama

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOI PERTANIAN JAWA TIMUR

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

Dan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

2008

PROSIDING SEMINAR PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI INFORMASI DAN
TEKNOLOGI PERTANIAN

PENYUNTING : Dr. Sudarmadi Purnomo
Dr. Moh. Cholil Mahfud
Dr. Djoko Koestiono
Dr. Kliwon Hidayat
Dr. Dini Hardini
Dr. Herman Subagio

ISBN : 978-979-3450-14-8

Kerjasama

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOI PERTANIAN JAWA TIMUR

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

Dan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

Diterbitan oleh

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

Jl. Raya Karangploso, km 4, Po Box 188 Malang 65101, Tlp. (0341) 494052, 485056, Fax. (0341) 471255
Email: bptp_jatim@yahoo.com; Website: <http://jatim.litbang.deptan.go.id>

SAMBUTAN ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PADA PEMBUKAAN SEMINAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yth. Sdr. Dr. Ahmad, Staf Khusus Ahli Menteri Pertanian bidang SDM

Yth. Sdr. Kepala Bappeprop Jawa Timur

Yth. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Propinsi Jawa Timur

Yth. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang

Yth. Sdr. Kepala BPTP Jawa Timur

Yth. Sdr. Kepala Unit Kerja/UPT Departemen di Jawa Timur, serta undangan yang
berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga kita berada di KP Mojosari dalam rangka silaturahmi unit kerja/UPT Departemen Pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan Demonstrasi dan Gelar Teknologi Pertanian, serta Seminar hasil litkaji sejak 14 Juli s/d 19 Juli 2008, tetap dalam keadaan sehat walafiat.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengucapkan terimakasih kepada Departemen Pertanian atas ditempatkannya 13 unit kerja UPT di Jawa Timur. Penempatan ini tentunya bukan tanpa alasan, mengingat Jawa Timur memiliki sumberdaya alam yang luas dan sangat potensial untuk dikembangkan melalui kajian-kajian teknologi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur. Hal ini terbukti dari hasil kinerja Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) di 19 kabupaten di Jawa Timur. Saya mengharapkan peran BPTP Jawa Timur secara periodik bisa melakukan antisipasi pengembangan dan penyempurnaan teknologi spesifik lokasi, utamanya pada program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) yang saat ini segera berjalan, dalam upaya mewujudkan agribisnis industrial perdesaan (AIP).

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, sudah selayaknya kita jaga, tingkatkan dan lestarikan ketersediaan pangan, meliputi padi, jagung, kedelai, sayuran, buah, daging, telur dll. Pada tahun 2009, Jawa Timur ditargetkan dapat meningkatkan surplus beras menjadi 4 juta ton. Hal ini tentunya membutuhkan peran dari semua pihak, serta dukungan teknologi yang ramah lingkungan agar kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga bagi generasi yang akan datang. Untuk itulah kami mengharapkan agar inovasi teknologi yang dihasilkan oleh BPTP dan sumber teknologi lainnya yang saat ini sedang diseminarkan, dapat memberi manfaat secara nyata bagi petani; keberadaannya lebih baik daripada teknologi yang sudah ada; praktis, mudah diterapkan sesuai sistem usahatani, efisien dalam memproduksi sesuai tata kehidupan sosial masyarakat, mampu menghasilkan produk yang aman, dan memberi nilai tambah secara ekonomi.

Hadirin yang saya hormati,

Memperhatikan kenaikan harga-harga pangan yang saat ini masih berlangsung akibat perubahan iklim global dan kenaikan harga minyak/energi, akan mempengaruhi

tingkat kebutuhan dan ketersediaan pangan secara keseluruhan. Dampak lain yang timbul adalah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan baru akibat lemahnya daya beli masyarakat. Untuk itulah kami berharap demo dan gelar teknologi pertanian yang diikuti dengan kegiatan seminar ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat petani dan mampu memberi kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, yaitu memperkuat sendi-sendi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas antara lain meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perdesaan melalui daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dasar dan energi serta pemantapan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan kebijakan publik. Peran dari BPTP sangat penting utamanya pada program pemberdayaan petani melalui penyuluhan agar masyarakat petani lebih mampu menggunakan teknologi serta dapat mengakses kebutuhan Informasi pertanian.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga seminar dalam rangka mendukung demonstrasi dan gelar teknologi pertanian ini, menjadi wahana untuk mempercepat proses transfer teknologi dan diseminasi hasil pengkajian di Jawa Timur. Atas segala perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surabaya, 16 Juli 2008

Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Ttd

Ir. Chaerul Djaelani
Pembina Utama Muda
Nip. 110 020 215

KESIMPULAN HASIL SEMINAR

Seminar "Pemberdayaan Petani melalui Informasi dan Teknologi" dilaksanakan atas kerjasama Balai pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur, di KP Mojokerto, diikuti oleh lebih dari 400 peserta (sebagian besar penyuluh), dan membahas dan mendiskusikan 11 makalah pemberdayaan kelembagaan dan petani, dan 35 makalah informasi teknologi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Dari pelaksanaan seminar ini, dapat disimpulkan sbb:

- (1) Banyaknya penyuluh yang mengikuti seminar ini menunjukkan bahwa seminar ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi penyuluh guna menambah wawasan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- (2) Baik petani maupun peternak, umumnya sudah memiliki kelembagaan petani berupa kelompok tani/ternak atau gabungan kelompok tani/ternak. Namun sementara ini keberadaannya lebih banyak untuk kepentingan proyek daripada usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani/peternak. Penguatan kelembagaan petani/peternak merupakan aspek penting dalam upaya menggerakkan kegiatan agribisnis di pedesaan. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan kelembagaan petani yang kuat, terutama dalam hal kebijakan pemasaran, permodalan, dan ketersediaan saprotan. Memperhatikan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan masih kurang, perlu dilakukan peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan dsb.
- (3) Inovasi teknologi berpeluang untuk diadopsi oleh petani apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) bermanfaat bagi petani secara nyata; (2) lebih unggul dibandingkan teknologi yang telah ada; (3) bersifat praktis, nyaman dan ergonomis; (4) sesuai dengan sistem usahatani petani; (5) bahan, sarana, alat mesin, modal dan tenaga untuk mengadopsi teknologi tersedia; (6) memberikan nilai tambah dan keuntungan ekonomis; (7) meningkatkan efisiensi dalam memproduksi; (8) sesuai dengan tata kehidupan sosial masyarakat dan gender; (9) bersifat ramah lingkungan; (10) menjamin keberlanjutan usaha pertanian; (11) produk yang dihasilkan bersifat aman konsumsi; dan (12) secara umum membawa manfaat bagi perbaikan ekonomi masyarakat. Dari makalah informasi yang dibahas, sebagian makalah sudah memenuhi kriteria tersebut misalnya varietas unggul, dan pengelolaan tanaman terpadu. Makalah-makalah bisa langsung digunakan sebagai materi penyuluhan oleh penyuluh lapangan. Sebaliknya sebagian makalah yang lain masih perlu dikaji dalam skala yang lebih luas dan pada lingkungan yang spesifik, sehingga efisiensi penerapannya pada skala usahatani dapat diketahui.

Mojokerto, 16 Juli 2008

ttd

Tim Perumus

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PADA PEMBUKAAN SEMINAR	iv
KESIMPULAN HASIL SEMINAR	vi
DAFTAR ISI	vii

I. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PETANI

MEMFASILITASI PETANI AGAR RESPONSIF TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI	1
<i>Sumarno</i>	
MODEL PEMBERDAYAAN PETANI GUNA MENUMBUHKAN AGRIBISNIS PEDESAAN	19
<i>Hari Prasetyo</i>	
PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI MENDUKUNG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PEDESAAN	25
<i>D. Koestiono dan M. Purnomo</i>	
PEMBERDAYAAN PETERNAK MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMASI	42
<i>K. Diwyanto dan H. Hasinah</i>	
MENGHUBUNGKAN PETANI DENGAN PASAR	57
<i>B. Irianto</i>	
INTRODUKSI TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN DI KAWASAN PRIMA TANI KABUPATEN LUMAJANG	68
<i>A. A. Widodo, Harwanto dan S. Purnomo</i>	
TINGKAT KEMAMPUAN DAN KESIAPAN SERTA PENDAPATAN PETANI PADA USAHA TANI PISANG MAS KIRANA (Studi Kasus di Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang)	75
<i>D. Koestiono dan D. Adelinda P</i>	
PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN GAPOKTAN SETYO MARGO RUKUN, PRIMA TANI MALANG	51
<i>Baswarsiaty, D. Rahmawati, Abu, A. Kusaeri, D. Purwadi, Rifai, E. Srihastuti</i>	
PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI PENANGKAR BENIH KENTANG PUTRA TENGGER DI KAB. LUMAJANG	105
<i>P.E.R. Prahardini, A. G. Pratomo, Harwanto, Wahyunindyawati dan E. Retnaningtyas</i>	
PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM PRIMA TANI) DI WILAYAH PRIMA TANI JAWA TIMUR	120
<i>B. Irianto, W. Istuti, B. Siswanto, E. Retnaningtyas dan T. Purbiati</i>	
KAJIAN PARTISIPASI DAN KOMITMEN PEREMPUAN DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO (LKM) PEDESAAN DI BEBERAPA LOKASI PRIMA TANI (Studi Perspektif Kemandirian Perempuan Kaitannya dengan LKM)	
<i>W. Istuti, B. Irianto, M. Mashuri dan Yuwoko</i>	

II. INFORMASI TEKNOLOGI

A. Tanaman Pangan

PENYEBARAN VARIETAS UNGGUL BARU PADI DI JAWA TIMUR	141
<i>B. Pikukuh, S. M. Roesmarkam, Handoko, dan D. Setyorini</i>	
PENERAPAN PTT PADA USAHATANI PADI VARIETAS UNGGUL BARU DI LOKASI PRIMA TANI KABUPATEN TULUNGAGUNG	147
<i>A. Suryadi, S. M. Roesmarkam dan Sulyanto</i>	
KERAGAAN HASIL BEBERAPA VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN USAHATANI	152
<i>M. Saeri, Purwanto dan F. Arifin</i>	
PRODUKTIVITAS PADI GOGO VARIETAS SITU BAGENDIT DI BAWAH NAUNGAN TANAMAN TAHUNAN DI LAHAN PERHUTANI	160
<i>R. Budiono, Suryanto, I. Juanda dan Rahmat W</i>	
PEMETAAN STATUS PRODUKTIVITAS PADI DI BEBERAPA LOKASI SENTRA PRODUKSI KABUPATEN JOMBANG	166
<i>Suwono, Sulyanto, D. Saraswati dan Z. Arifin</i>	
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI USAHATANI PADI MELALUI PENERAPAN PTT	176
<i>Purwanto, F. Arifin, M. Saeri dan Supi'i</i>	
PENGARUH PEMBERIANPUPUK KASCING TERHADAP PENGURANGAN PUPUK AN-ORGANIK PADA TANAMAN PADI	182
<i>A. G. Pratomo, Robiin dan Suwono</i>	
PERBANDINGAN USAHATANI TANAMAN EKSISTING (PADI) DENGAN TANAMAN INTRODUKSI (MELON) DI BOJONEGORO	189
<i>Handoko, Gunawan dan R. Asnita</i>	
PERBAIKAN TEKNIK BUDIDAYA JAGUNG DI LAHAN KERING KABUPATEN SUMENEP	195
<i>Z. Arifin, N. Istiqomah dan I. R. Dewi</i>	
PENINGKATAN HASIL DAN MUTU JAGUNG HIBRIDA MELALUI PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA	203
<i>S. Yuniastuti, Suhardi, E. Retnaningtyas, L. Amalia dan A. Rosid</i>	
PENGKAJIAN SISTEM INTEGRASI JAGUNG-TERNAK DI LAHAN SAWAH TADAH HUJAN	211
<i>Z. Arifin, M. A. Yusron, N. Istiqomah, Indriana RD dan Noeriwan</i>	
KERAGAAN PRODUKSI DAN UMBI LIMA VARIETAS UBI JALAR SPESIFIK LOKASI DI GUNUNG KAWI, MALANG	224
<i>Baswarsiati, S. Purnomo, D. Rahmawati, Abu dan A. Kusaeri</i>	
ANALISIS DAMPAK HASIL PENGKAJIAN MARNING GEPENG DI KABUPATEN KENDAL	231
<i>P. Santoso, A. Suryadi dan Yuniarti</i>	

BRANDING PRODUK OLAHAN TORTILA DI WILAYAH PRIMA TANI KABUPATEN PACITAN	238
--	-----

Suhardjo, Z. Arifin, Suhardi, E. Retnaningtyas, P. Santoso dan S. Harwanti

PENGARUH GUM XANTHAN SEBAGAI PENGENDALI STRUKTUR DALAM PEMBUATAN ROTI MANIS DARI BAHAN BAKU CAMPURAN TEPUNG TERIGU DAN TEPUNG JAGUNG	245
--	-----

Sukanto

PENGOLAHAN SUSU SARI KEDELAI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI PRIMA TANI BOJONEGORO	255
---	-----

Gunawan, R. Asnita dan Handoko

PENGARUH BLENG, AIR MERANG DAN STPP TERHADAP SIFAT ORGANOLEPTIK KERUPUK PULI RAMBAK	266
---	-----

I. Yustina, Suhardjo, Jumadi dan H. D. Isharyanti

B. Hortikultura

INTRODUKSI TANAMAN SAYURAN DATARAN TINGGI DI DESA DOMPYONG, BENDUNGAN, TRENGGALEK	271
---	-----

A. G. Pratomo, L. Rosmahani, T. Zubaidi dan Sugiono

PENGKAJIAN PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA KENTANG UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PANEN DI WILAYAH PRIMA TANI KABUPATEN MAGETAN	278
---	-----

Yuniarti, P. Santoso, Subandi, E. Susanto, Al. Budiono, H. Arianto dan Ariyono

PENGARUH PUPUK AMMONIUM PHOSPHATE TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH	286
---	-----

D. Setyorini, Kasijadi dan Abu

PENGKAJIAN SISTEM USAHATANI BAWANG MERAH BERBASIS BIOPESTISIDA	296
--	-----

E. Korlina, D. Rachmawati, Z. Arifin, L. Rosmahani dan Sarwono

KAJIAN EFEKTIFITAS INSEKTISIDA SIPERMETRIN TERHADAP HAMA PERUSAK DAUN (<i>SPODOPTERA EXIGUA</i>) PADA BAWANG MERAH	305
--	-----

D. Rachmawati, Handoko dan Sarwono

PENGKAJIAN SISTEM USAHATANI TANAMAN MANGGIS BERORIENTASI GAP (GOOD AGRICULTURE PRACTICES)	311
---	-----

T. Purbiati, Suhardjo, Z. Arifin dan Sarwono

KAJIAN KERAGAAN MUTU PISANG MAS KIRANA YANG TERPASARKAN DI WILAYAH PRIMA TANI KABUPATEN LUMAJANG	319
--	-----

A. A. Widodo, Harwanto dan S. Purnomo

EFEKTIFITAS JENIS PEBRONGSONG BUAH TERHADAP SERANGAN LALAT BUAH <i>BACTROCERA DORSALIS</i> DAN ANTRAKNOS <i>COLLETOTRICUM GLOEOSPORIOIDES</i> PADA MANGGA PODANG URANG PASCAPANEN	323
---	-----

Sarwono

PENGKAJIAN RAKITAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DODOL SALAK DAN PISANG DI PEDESAAN	328
--	-----

Suhardi, Suhardjo, Yuniarti, E. Retnaningtyas dan Bonimin

PENUMBUHAN AGRIBISNIS KERIPIK SAWO (*ACHRAS ZAPOTA* L) DAN KERIPIK NANGKA (*ARTOCARPUS INTEGRA* MERR) DI WILAYAH PONDOK PESANTREN DESA BUNBARAT KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP 337

N. Istiqomah, Z. Arifin, I. R. Dewi dan Bonimin

KAJIAN BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU BUNGA KRISAN DI LABORATORIUM AGRIBISNIS PRIMA TANI KABUPATEN PASURUAN 348

M. C. Mahfud, D. Rachmawati, S. Nurbanah dan Sarwono

STUDI PENDAHULUAN KEMANGKUSAN *METARHIZIUM ANISOPLAE* DAN *BEAUVERIA BASSIANA* TERHADAP HAMA APHID ALPINIA (*PENTALONIA NIGRONERVOVA* COQ) 355

D. Sihombing, E. S. Yusuf dan W. Handayati

PENGKAJIAN EFEKTIFITAS CENDAWAN *BEAUVERIA BASSIANA* TERHADAP PERKEMBANGAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KRISAN 361

E. Korlina, M. C. Mahfud, D. Rachmawati dan Sarwono

C. Perkebunan

KAJIAN KLONALISASI KOPI ROBUSTA DENGAN BEBERAPA KLON UNGGUL BARU 368

S. Yuniastuti, Harwanto dan S. Purnomo

PENGKAJIAN PENERAPAN MODEL AGRIBISNIS TANAMAN KAKAO DI WILAYAH KAWASAN SELATAN JAWA TIMUR 378

L. Rosmahani dan S. Nurbanah

D. Peternakan

PRODUKSI TELUR AYAM YANG MENGANDUNG PERBANDINGAN OMEGA-3 : OMEGA-6 IDEAL UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT JANTUNG KORONER 390

D. Hardini dan Supadmo

KAJIAN AGRIBISNIS SUSU KAMBING PE DI WILAYAH PRIMA TANI KABUPATEN LUMAJANG 401

Harwanto, P.E.R. Prahardini dan A.A.Widodo

PENGEMBANGAN PABRIK PAKAN SKALA KECIL PADA TINGKAT KELOMPOK TANI UNTUK MENDUKUNG AGRIBISNIS PETERNAKAN DI JAWA TIMUR 408

R. Hardianto

PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI Mendukung PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PEDESAAN

D. Koestiono dan M. Purnomo

Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

PENDAHULUAN

Masalah kelembagaan selalu mendapat tempat dalam setiap aktifitas aksi pembangunan sehingga setiap program mensyaratkan ahli kelembagaan turut serta. Meski sangat populer, pada dasarnya kelembagaan yang dipahami para pelaku pembangunan termasuk para ilmuwan banyak tidak benar. Syahyuti (2004) mensinyalir bahwa kelembagaan lebih cenderung menjadi jargon politik daripada usaha sungguh-sungguh untuk membangkitkan pertanian. Bahkan beliau mengatakan telah terjadi sesat pikir (*fallacy*) dalam pengembangan kelembagaan selama ini terutama pada *enacted institution*.

Pada dasarnya pengembangan kelompok tani merupakan aktifitas yang sangat penting bagi pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Namun demikian selama ini pengembangan kelembagaan tani sangat bias kelompok tani sehingga stake holder lain yang semestinya menjadi bagian integral dari pengembangan kelompok tani tidak tergarap. Selain keterbatasan dana dan waktu, pola pengembangan kegiatan yang masih terpisah-pisah antar elemen baik pemerintah, NGO, dan pelaku lainnya menjadikan komunitas pertanian kita bagaikan hutan lebat kelembagaan. Tiap kekuasaan berganti berganti pula kelembagaan yang dikembangkan.

Kelembagaan selama ini dipahami sebagai "tatanan dan organ" yang diintrodusir pada sistem sosial untuk merubah atau menggantikan "tatanan dan organ" lama guna mengefisienkan aktifitas sosial tertentu. Dibangun organisasi beserta aturan-aturannya yang diharapkan akan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski tidak sepenuhnya salah, pengembangan kelembagaan tani pada dasarnya tidak hanya usaha untuk membangun organisasi tani, tapi lebih sebagai usaha untuk mengembangkan sebuah kompleks nilai dan struktur terkait dengan aktifitas-aktifitas tertentu sehingga masyarakat menjadikannya sebagai rujukan.

Terkait dengan usaha pertanian, maka kelembagaan adalah pembangunan kompleks nilai dan struktur yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja usaha-usaha pertanian. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan alternatif strategi pengembangan kelembagaan yang memungkinkan usaha-usaha pertanian/agribisnis lebih efisien guna mendorong kesejahteraan masyarakat pertanian juga membangun perekonomian negara sekaligus ketahanan sosial masyarakat.

DETERMINISME ORGANISASI TANI ATAS KELEMBAGAAN TANI

Dalam rangka menemukan sebuah "formulasi" kelembagaan yang tepat kita harus mengetahui kelembagaan yang sudah dikembangkan selama ini. Kelembagaan pertanian di Indonesia bukan merupakan sesuatu baru dalam kehidupan masyarakat pertanian. Kelembagaan tani secara sengaja telah dikembangkan sejak jaman kolonial, awal kemerdekaan, Orde baru, dan reformasi hingga saat ini. Pada masing-masing masa, kelembagaan pertanian memiliki orientasi kelembagaan yang berbeda. *Pertama*, pada masa penjajahan Belanda, kelembagaan pertanian diarahkan sebesar-besar untuk mendukung produksi pertanian yang laku di pasaran dunia melalui rekayasa organisasi produksi secara paksa. Petani diorganisir dalam suatu organisasi produksi dengan memanfaatkan kekuasaan-kekuasaan tradisional yang sepenuhnya dikontrol oleh mereka. Tanaman paksa di Jawa merupakan bentuk rekayasa organisasi produksi paling berhasil karena mampu meningkatkan produksi dan mengefisienkan proses produksi hingga dapat langsung terserap oleh pasar. Hingga saat ini, tanam paksa merupakan kelembagaan paling "efisien" secara ekonomis karena mampu memberikan keuntungan finansial sangat besar hingga menyelamatkan kebangkrutan Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang, kelembagaan tani lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang terutama bahan bakar dan pangan. Meski hanya beberapa tahun saja berkuasa, Jepang mampu memobilisasi sebuah organisasi produksi yang efektif yang sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Pada masa itu seluruh potensi produksi dikerahkan untuk menyukseskan produksi pangan dan bahan bakar. Jarak yang akhir-akhir ini menjadi salah satu bahan bakar alternatif merupakan salah satu komoditas yang banyak dikembangkan oleh pemerintah Jepang yang masih dapat dilihat hingga saat ini.

Kedua, pada masa awal kemerdekaan kelembagaan petani lebih diarahkan untuk membangun ekonomi bangsa. Perang berlarut-larut berakibat pada lumpuhnya kelembagaan tani hingga koordinasi untuk mengefisienkan produksi tidak berjalan. Meski ada program-program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, kelembagaan tani berjalan tanpa ada tujuan yang jelas. Pada masa-masa ini terutama setelah perang usai tahun 50an, banyak kekuatan-kekuatan politik yang membangun sebuah kelembagaan tani dengan organisasi taninya sebagai inti. Persatuan Petani Nahdlatul Ulama' atau PERTANU, Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan organisasi-organisasi tani lainnya merupakan contoh organ inti dari kelembagaan yang dibangun oleh kekuatan politik. Pemerintah sendiri pada masa-masa ini tidak pernah mampu membangun kelembagaan yang lebih netral dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik.

Ketiga, pada masa Orde Baru kelembagaan tani lebih digunakan untuk memproduksi pangan dengan cara memobilisasi seluruh sumberdaya guna mendukung industri. Organisasi tani sebagai inti dari kelembagaan tani dibentuk berdasarkan inisiatif

negara dan digunakan sebagai pintu untuk memasukan teknologi baru pertanian yang kita kenal dengan "Revolusi Hijau". Tidak hanya organisasi tani, mahasiswa juga dikerahkan untuk menyukseskan gerakan ini melalui bimbingan massal atau BIMAS. Kelembagaan tani yang dibangun pada masa Orde baru ini juga tergolong "efisien" dalam memobilisasi sumberdaya terbukti mampu berswasembada beras tahun 80an.

Keempat, pada masa reformasi sepenuhnya kelembagaan tani tidak mendapatkan perhatian cukup sehingga berkembang secara alamiah tanpa sentuhan inovasi. Secara sporadis NGO-NGO melakukan pengembangan kelembagaan tani yang tentu saja sangat tergantung pada konsen masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dan pusat juga melakukan kegiatan hanya saja tidak mampu mencakup seluruh kelompok masyarakat dan hanya sebagai bagian dari program-program khusus seperti Prima Tani atau program-program sejenis karena keterbatasan dana. Akhir-akhir ini ada gerakan yang coba dikembangkan secara nasional seperti GAPOKTAN yang juga terbatas dalam pendanaan.

Pada setiap masa, kelembagaan tani selalu dikembangkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna melayani kepentingan kekuasaan. Meski masing-masing masa memiliki alasan tersendiri dalam strategi pengembangan kelembagaannya, namun kepentingan petani dan eksisting kelembagaan lokal yang telah mengakar kurang diperhatikan. Rekayasa seringkali dilakukan dengan paksaan sehingga partisipasi yang muncul sangat semu. Selain itu, kelembagaan yang dikembangkan tidak pernah mampu mentransformasikan organisasi produksi pertanian menjadi lebih berdaya dan memiliki ketahanan yang kuat dalam setiap perkembangan jaman.

Berdasarkan atas kondisi diatas, maka kelembagaan tani memiliki beberapa kelemahan mendasar baik pada pengembangan nilai-nilai dasar yang dibangun juga pada pengembangan struktur/pola hubungannya. Seringkali nilai-nilai dasar yang dijadikan sumber inspirasi tidak pernah menggunakan nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Cara baru tidak berarti lepas begitu saja dengan nilai lokal sehingga pekerjaan seorang pendamping/CO/PPL dan pekerja sosial lainnya hanya sibuk mengurus penyesuaian nilai daripada sumbuansi kelembagaan yang dibangun.

Terkait dengan struktur yang dikembangkan, seringkali para inisiasi kelembagaan tani terfokus pada struktur organisasi tani. Kelembagaan lain seperti Inisiasi pasar tani dan kelembagaan pendanaan jarang dikembangkan sehingga tidak terjadi keseimbangan dalam aktifitas pertanian. Selama ini penguatan kelembagaan hanya terjadi pada organisasi tani sementara hubungan dengan stake holder lain tidak dibangun dan dianggap terpisah dari startegi pengembangan kelembagaan.

STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

1. Tahapan Penguatan Kelembagaan

Membangun sebuah kelembagaan yang mapan harus melalui tahap-tahap tertentu dimana masing-masing tahap menunjukkan tingkat kinerja tertentu. Selama ini setiap pelaku pengembangan kelembagaan tidak pernah taat pada kaidah-kaidah dan tahapan-tahapan pengembangan sehingga seringkali kelembagaan yang terbangun sangatlah instan. Waktu yang tergesa-gesa karena target proyek serta keterbatasan kemampuan para Community Organizer (CO) yang diterjunkan sangat menghambat pembentukan kelembagaan yang mapan.

Paling tidak ada empat tahap perkembangan yakni: (1) tahap inisiasi atau sensitization dan pembangkitan minat/kesadaran, (2) tahap konsolidasi atau group formation, (3) tahap penguatan institusi, dan (4) tahap pengembangan institusi.

Pertama, tahap pembangkitan minat adalah tahap untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem nanti serta perumusan perannya masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat harus secara rinci teridentifikasi kemungkinan perannya nanti dalam sistem. Bagi lembaga yang baru dibentuk untuk melengkapi sistem, juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak kontra produktif dengan keberadaan sistem yang akan dibangun. Sebagai misal kelompok tani, harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan sistem dan tidak asal membentuk sehingga keberadaannya tidak fungsional dengan lembaga lain yang telah ada. Pada tahap inisiasi ini, jaringan dan komitmen telah dibangun juga telah disepakati aturan-aturan main yang akan digunakan nanti. Tahap ini juga sering dikenal dengan tahap penguatan jaringan.

Kedua, tahap group formation atau konsolidasi adalah tahap dimana kelembagaan yang telah terbangun saling mencocokkan satu dengan yang lainnya baik dalam fungsi maupun nilai-nilainya. Pada tahap ini terjadi pencarian bentuk hubungan yang optimal sehingga akan terjadi benturan dan kompromi hingga terjadi kondisi yang stabil. Pada tahap ini juga akan terjadi penambahan atau pengurangan pihak yang terlibat tergantung pada kebutuhan sistem. Nilai demikian juga akan berubah sesuai dengan dinamika pihak-pihak yang terlibat karena faktor eksternal dan internalnya hingga diperoleh kondisi yang optimal. Tahap konsolidasi ini pada dasarnya adalah tahap *try and error*-nya sistem yang dibangun. Pada tahap ini akan terjadi tambal sulam sistem baik nilai maupun pihak-pihak yang terlibat.

Ketiga, tahap penguatan institusi adalah tahap dimana pihak-pihak yang terlibat dan nilai-nilai telah fungsional satu dengan yang lainnya serta sistem telah berfungsi secara optimal. Perubahan hanya terjadi jika terdapat dinamika di eksternal sistem yang memaksa sistem untuk berubah. Pada tahap ini, sistem sudah mulai berorientasi pada perluasan baik jangkauan pengaruh maupun jumlah pihak yang terlibat. Jika pada tahap

awal hanya tiga atau empat kelompok tani yang terlibat, pada tahap ini mungkin dapat ditambah lagi. Atau jika lembaga penyedia modal hanya BPR pada tahap ini dapat ditambah dengan bank umum atau lembaga sejenis yang cocok dengan karakteristik sistem. Sifat perubahan yang terjadi pada tahap ini lebih pada pengembangan sistem agar lebih luas cakupannya.

Keempat, tahap pengembangan institusi merupakan tahapan pengembangan setelah institusi mapan berupa kegiatan penambahan aktifitas pelayanan kepada seluruh pihak yang terlibat. Pada tahap ini stake holder yang terkait dengan institusi juga semakin berkembang meliputi institusi pemerintah, swasta ataupun NGO guna menjalin hubungan kerjasama bagi pengembangan institusi. Pada tahap-tahap ini organisasi juga mulai mencapai tahap efisiensi yang tinggi karena terjadi proses seleksi atas nilai-nilai yang dikembangkan juga struktur yang terbentuk. Secara skematis tahapan proses pengembangan kelembagaan tani terkait dengan pengembangan agribisnis dapat dilihat pada Gambar 1.

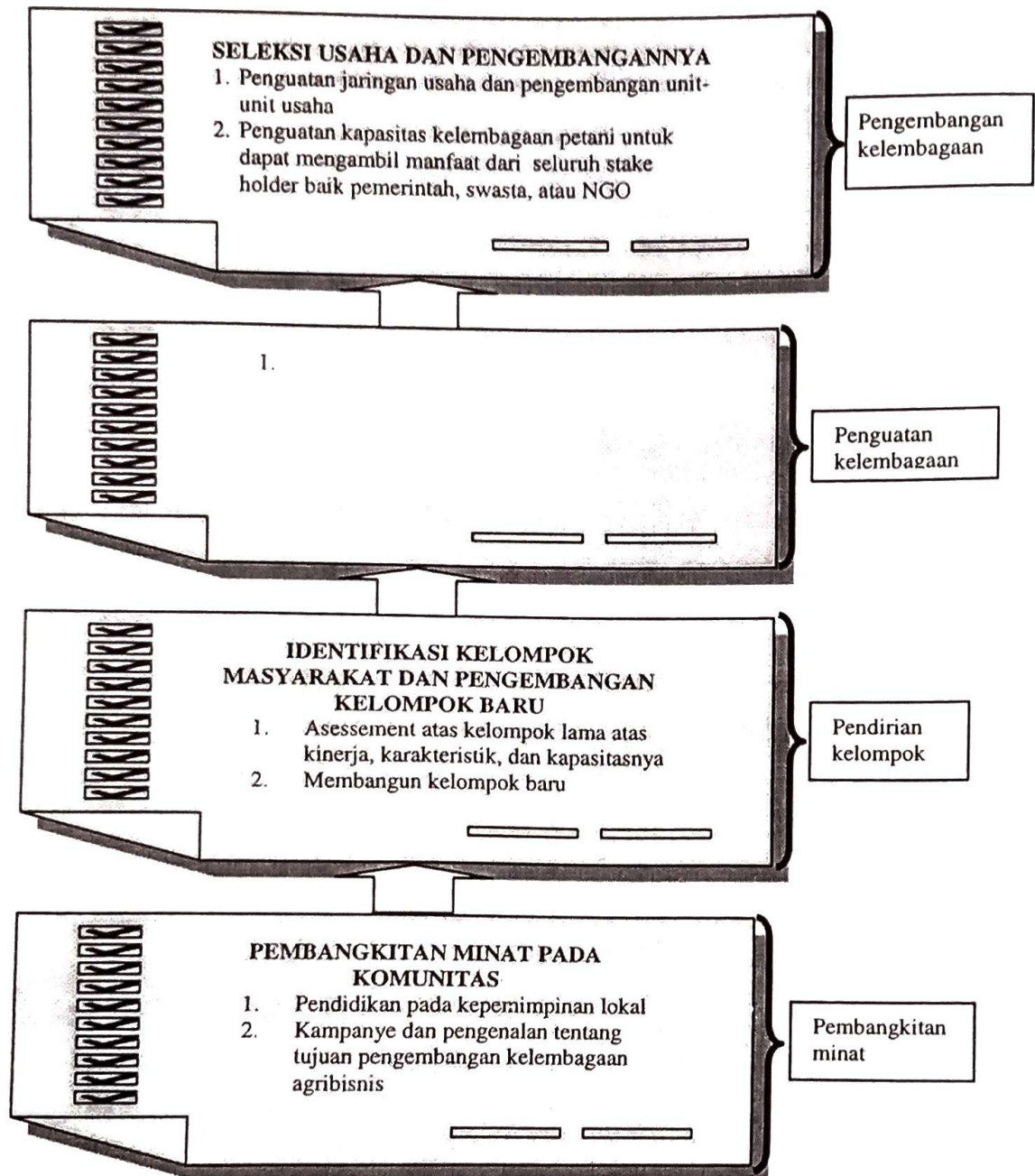
2. Pola Kelembagaan Pendukung Pengembangan Agribisnis

Kelembagaan tani seringkali merupakan sebuah hal baru dalam masyarakat terutama bila kelembagaan tersebut memang disusun untuk meningkatkan efisiensi sebuah aktifitas usahatani. Oleh karena itu maka pola-pola patnership antar stake holder sangat beragam tergantung pada konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Pada satu waktu peran pemerintah perlu dominan sementara di sisi lain peran swasta mungkin lebih besar. Kadang-kadang ketika kemandirian masyarakat lokal sangat besar peran pemerintah menjadi kecil dan NGO atau masyarakat sendiri mampu menginisiasi sebuah bentuk kelembagaan baru.

Paling tidak ada tiga pola inisiasi kelembagaan yakni: (1) patnership antara organisasi lokal (CBO) dan pemerintah daerah, (2) patnership antara organisasi lokal dengan NGO dan sektor swasta, dan (3) patnership langsung antara organisasi lokal dan pemerintah pusat. Pola kerjasama ini menentukan pola pembiayaan, model mobilisasi komunitas, model peningkatan kapasitas SDM, fokus aktifitas, ijin investasi, desain proyek dan implementasi, dan organisasi serta manajemen.

Pada pola CBO dan pemerintah lokal, pembiayaan awal dilakukan oleh CBO atau pemerintah lokal, pemerintah lokal memberi kemudahan seperti pajak untuk pengembangan aktifitas CBO, maching grant dari pemerintah lokal, atau fasilitas kredit dari pemerintah daerah. Mobilisasi komunitas dilakukan oleh NGO atau swasta melalui kerja-kerja pemberdayaan yang dikontrak oleh pemerintah. Pada pola ini, dalam rangka meningkatkan kapasitas CBO pemerintah menggunakan NGO untuk melakukan training-training baik keahlian teknis maupun kapasitas organisasinya. Aktifitas-aktifitas utama kelembagaan adalah memfasilitasi/konsultasi antara kepentingan CBO dan komunitas

dengan pemerintah lokal. Pada dasarnya pola ini didesain dan diimplementasi oleh pemerintah sementara NGO menjadi fasilitator dan pemerintah menjadi advisor saat program berjalan.



Gambar 1. Tahap pengembangan kelembagaan tani dalam mendukung agribisnis

Pada pola CBO dan NGO/private sektor, pembiayaan awal lebih didominasi oleh CBO kadang juga NGO dan pemerintah melalui program-program matching grant. Mobilisasi komunitas dilakukan oleh NGO atau swasta yang dikontrak oleh pemberi dana.

Sementara itu, NGO dan swasta yang dikontrak oleh penyandang dana menyediakan pelatihan kapasitas kelembagaan dan individu CBO. Berbeda dengan pola CBO-pemerintah, pola ini lebih menekankan pada rumah tangga dan komunitas yang benar-benar disuport oleh NGO dimana program didesain sepenuhnya oleh CBO dan NGO.

Pada pola CBO dan Pemerintah pusat atau penyandang dana khusus biasanya CBO harus menyediakan pendanaan awal atas aktifitas-aktifitasnya. Selain itu untuk program-program matching grant juga menjadi sumber pendanaan selain juga kesempatan untuk mendapatkan kredit terutama untuk pelaksana swasta. Pola ini biasanya dikampanyekan secara nasional untuk menggerakkan masa sekaligus memberi penjelasan tentang aturan main program. Pola-pola PNPM dan gerakan-gerakan nasional dimana pemerintah pusat langsung memberikan pendanaan pada CBO dengan asistensi teknis oleh NGO merupakan contoh pola ini. Kegiatan-kegiatan teknis didesain sepenuhnya oleh CBO melalui musyawarah warga sesuai dengan aturan mainnya yang sepenuhnya difasilitasi oleh NGO atau konsultan swasta. Secara detail mengenai pola-pola pengembangan kelembagaan tani dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tiga pola kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis

ROLE/RESPONSIBILITIES	Partnerships between CBOs and elected local governments	Partnerships between CBOs and NGOs/private firms	Direct partnerships between CBOs and central government or central fund
Finance	- Local govt or CBO provides upfront investment (in cash or kind) - Untied inter-governmental fiscal transfers complement local tax revenues - alternative is for transfers to be tied to specific program outputs. - Matching grants to CBOs from local governments - Credit financing recommended for the more private goods.	- CBOs provide upfront investment (in cash or kind). - Matching grants received from central government/fund (either directly or through the NGO/private firm) - NGO financing can also be leveraged. - Credit financing recommended for the more private goods.	- CBOs provide upfront investment (in cash or kind). - Matching grants received from the central fund/government - Credit financing recommended for the more private goods.
Community Mobilization	Local government mobilizes the community with the help of contracted NGOs or private firms employing facilitators.	NGO/private firm contracted by central fund/government mobilizes the community.	National program oversees mass information campaigns to solicit community demand and clarify rules of the game.
Training & Capacity Building	Local government contracts with private sector or NGOs for capacity-building and training support to CBOs	NGO/private firm contracted by central fund/government provides capacity-building and training support to CBOs.	Private sector or NGOs contracted by CBOs themselves.
Initial request & Prioritization	Consultations with communities and CBOs, with local government facilitation.	Community/households with support from NGO/private firm.	Community/households, often with support from local private sector or NGO chosen by CBOs
Approval of Investments	Local government.	Central government/fund sometimes delegated to NGO/private firm (where possible involving local government).	Central government/Fund (where possible, decentralized to local government or local council).
Project Design & Implementation	Local government may provide technical and/or supervisory support in design and implementation, either directly or through the private sector/NGOs.	CBOs with support from the private sector and/or NGOs (where possible, involving local government).	CBOs with support contracted from private sector and/or NGOs.
O & M	Responsibility of local governments vs CBOs will vary by sector and type of good or service.	CBOs with support from the private sector and/or NGOs (where possible, involving local government).	CBOs, in some cases with support from local private sector, local or national government

Sumber: Vajpas dkk (2003)

Pada pengembangan agribisnis di Indonesia, pilihan atas pola sangat terkait dengan tingkat pengetahuan petani dan kemampuan pendanaan pemerintah. Luasnya wilayah kerja departement pertanian, sepenuhnya menggunakan pola langsung dari pusat ke CBO sangat berat dan mahal. Oleh karena itu pilihan kerjasama pemerintah lokal dengan CBO difasilitasi oleh NGO dan di dukung oleh pemerintah pusat seperti pola pertama sangat memungkinkan. Pemerintah pusat hanya menjadi suporting sistem dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendampingan dan asistensi. Quasi BIMAS yang masih mewarnai beberapa model pengembangan kelembagaan akhir-akhir ini sangat "berbahaya" apalagi jika tidak dilakukan secara nasional <seluruh wilayah dan komunitas> karena pemerintah hanya mampu menangani sedikit bagian dari gerakan.

3. Konsultasi Komunitas Untuk Membangun Kelembagaan

Prinsip mendasar dalam pengembangan kelembagaan tani adalah partisipasi penuh komunitas sebagai subyek pemberdayaan. Partisipasi menjamin program benar-benar merupakan kebutuhan komunitas sekaligus dapat dijalankan karena telah direncanakan dan diimplementasikan sepenuhnya oleh komunitas. Pola apapun yang dipakai untuk mengembangkan kelembagaan partisipasi komunitas menjadi syarat utama. Partisipasi komunitas dalam penciptaan kelembagaan ini akan menjamin keberlangsungan kelembagaan karena kelembagaan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka secara riil. Konsultasi komunitas merupakan bagian dari upaya untuk memperkaya kehidupan sosial ekonomi komunitas hingga mereka dapat hidup lebih baik karena seluruh kepentingannya terlayani.

Ponniah dkk (2008) mengungkapkan bahwa proses pengembangan kelembagaan pada dasarnya merupakan bagian dari usaha-usaha pendidikan kemasyarakatan dan merupakan proses belajar bersama. Beliau mengungkapkan ada sebuah proses learning circle yang terus terjadi dalam masyarakat dimana kelembagaan menjadi bagian integral dari proses tersebut. Proses tersebut meliputi enam fase utama yakni: (1) fase inisiasi perubahan, (2) fase pencarian cara baru, (3) fase perencanaan dan penguatan kapasitas organisasi lokal, (4) fase percobaan implementasi, (5) fase berbagi pengalaman, serta (6) fase refleksi serta perencanaan baru. Enam proses tersebut terus terjadi hingga terbangun sebuah kelembagaan yang benar-benar mapan dan terus tanggap terhadap perubahan.

Pada fase inisiasi perubahan empat langkah yakni membangun kepercayaan dengan komunitas, identifikasi organisasi lokal, identifikasi inovasi dan inovator lokal, serta sharing dan merefleksi keadaan dengan komunitas. Pada fase ini seluruh profil komunitas berserta kelembagaan-kelembagaan yang ada telah teridentifikasi sebagai landasan apa yang akan dilakukan terhadap organisasi serta komunitas.

Pada fase pencarian jalan baru terdapat empat langkah yakni menciptakan kepemilikan lokal dan tantangannya, identifikasi dan belajar tentang penyedia layanan, identifikasi dan eksplorasi solusi yang mungkin dilakukan tentang proses perubahan, sumber inovasi dari luar serta pengalaman inovasi lokal, dan sharing dan berefleksi dengan komunitas.

Pada fase perencanaan dan penguatan kapasitas organisasi lokal terdapat empat langkah yakni pengembangan perencanaan komunitas dengan organisasi lokal, pengembangan strategi untuk mentransformasi organisasi lokal, menghubungkan organisasi dengan sumber inovasi yang telah diidentifikasi dan pelayanan jasa.

Pada fase implementasi aksi ditempuh melalui dua kegiatan utama yakni mendorong kreatifitas dalam setiap implementasi serta mencoba ide-ide baru. Pada tahap ini kreatifitas dalam mengimplementasikan rencana serta selalu mencoba cara-cara baru menjadi sesuatu yang paling mendasar untuk menjamin terjadinya proses pendewasaan kelembagaan.

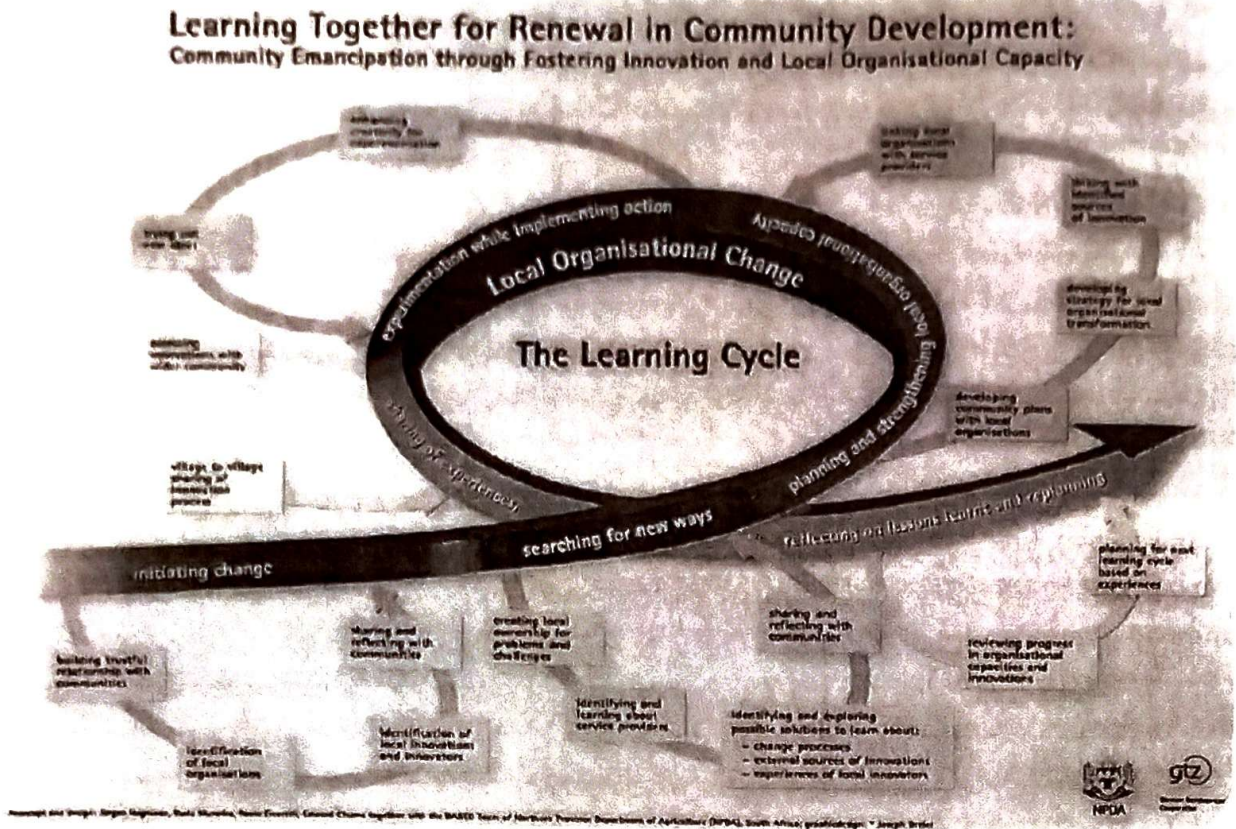
Pada fase sharing pengalaman, inovasi tidak hanya terbatas pada komunitas tapi terus diperluas pada komunitas lain. Selain itu juga harus selalu dilakukan sharing antar desa tentang inovasi baru. Proses ini dilakukan agar semakin terjadi pengkayaan inovasi tidak hanya dari dalam tapi juga dari komunitas lain selain untuk meningkatkan jaringan kelembagaan antar komunitas.

Pada fase refleksi dan perencanaan baru adalah proses dimana seluruh pengalaman yang telah dilakukan setelah fase-fase sebelumnya dilalui. Fase ini meliputi dua kegiatan utama yakni review kemajuan kapasitas organisasi dan inovasi yang dihasilkan serta perencanaan untuk step berikutnya berdasarkan pada pengalaman sebelumnya dan demikian terus berputar pada fase pertama. Sebagai ilustrasi fase-fase tersebut dipaparkan dalam Gambar 2.

PENGEMBANGAN ORGANISASI TANI SEBAGAI INTI KELEMBAGAAN

1. Pemetaan Elemen-Elemen Yang Terlibat

Seluruh konsep pengembangan kelembagaan di atas hanya akan berjalan jika didukung oleh sebuah organisasi tani sebagai inti dari seluruh pengembangan kelembagaan. Meski komunitas sebagai entitas sebenarnya telah terorganisir, namun demikian untuk kepentingan pengembangan pertanian atau usaha-usaha agribisnis tuntutan adanya organisasi yang mapan dan mumpuni yang secara khusus menjadi inpirator perubahan dalam komunitas menjadi sangat penting.



Sumber: Ponniah dkk (2008)

Gambar 2. Lingkaran pengembangan kelembagaan pada pengembangan masyarakat

Kelompok merupakan media untuk meningkatkan posisi orang per orang yang dulunya lemah menjadi kuat. Kelompok dengan demikian menunjuk keadaan-keadaan sebagai berikut: (1) terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial, (2) menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif, (3) terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena kelompok-kelompok dapat menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat luas, (4) tumbuh kembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter, serta (6) meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

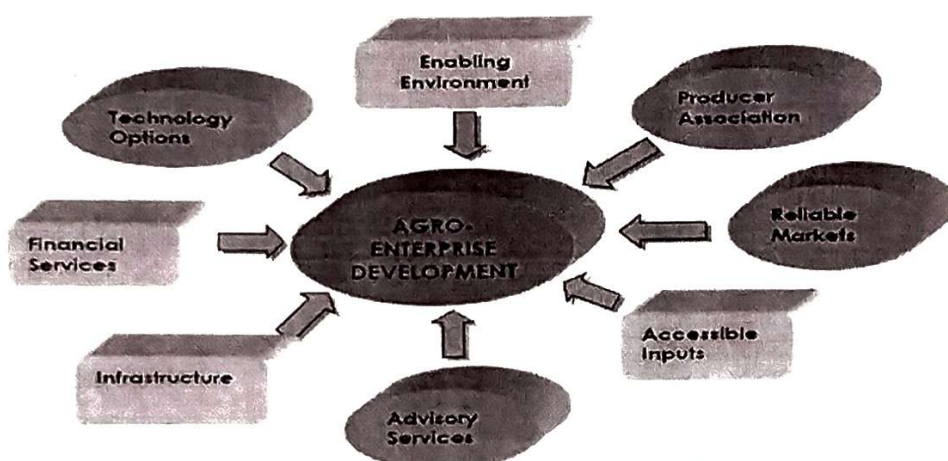
Secara sendiri-sendiri tidak mudah bagi siapapun untuk mengembangkan kehidupan ekonomi, kesempatan politik, juga keberdayaan social keluarganya. Keterbatasan pengetahuan, kelangkaan sumberdaya dan sempitnya peluang, membelenggu individu untuk berkembang. Kerjasama, saling membantu, terbukti dapat memperkuat posisi, meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan orang lain. Saling

menolong dan bekerjasama memperkuat pemupukan sumber pelayanan ekonomi, politik, dan budaya serta memperluas kesempatan untuk mencapai kemajuan.

Oleh karenanya pendekatan kelompok diperlukan agar: (1) memperoleh persahabatan dan kerjasama, (2) mewujudkan semangat saling membantu, (3) Melatih diri berfikir bersama dan bermusyawarah, (4) mengembangkan sikap dan motivasi untuk maju, (5) belajar memimpin dan bertanggung-jawab, (6) Belajar memutuskan tujuan dan rencana hidup yang jelas, (7) mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung, (8) mengembangkan usaha produktif, (9) memperoleh pelayanan pinjaman untuk modal usaha, (10) meningkatkan pelayanan pihak lain (misalnya bank), (11) memperluas hubungan pergaulan dan kesempatan-kesempatan, serta (12) memperoleh bimbingan dan pendampingan.

Terkait dengan pengembangan kelompok tani yang berbasis pada agro-interprise, maka kita perlu memetakan beberapa element penting yang nantinya terlibat dalam seluruh aktifitas pengembangan kelompok. Ada dua domain satu yang dapat diperankan oleh Lembaga teknis (Deptan) dan dari luar yang harus dibangun kerjasamanya. Ada empat peran yang dapat dikerjakan oleh lembaga teknis yakni mendorong pengembangan teknologi, memberikan pendampingan, mendorong pengembangan pasar, dan menggalang asosiasi produsen (petani).

Sementara itu servis yang harus dibangun jaringannya dengan pihak lain adalah pelayanan keuangan, infrastruktur, penciptaan lingkungan yang kondusif, serta penyiapan input yang dapat diakses. Seluruh pelayanan tersebut sepenuhnya tergantung pada pembangunan hubungan dengan pihak luar karena seluruhnya telah masuk dalam pasar yang bebas. Sebagai ilustrasi element-element yang terkait dengan pengembangan agro-interprise dapat dilihat dalam Gambar 3.



Sumber : Ann Stroud dkk (2006)

Gambar 3. Element-element dalam pengembangan agro-interprise

Setelah element-element tersebut teridentifikasi, maka kita melangkah pada proses pembentukan kelompok. Tahap ini tidaklah baku dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan eksisting kelembagaan-kelembagaan yang telah ada. Ponnia dkk (2008) mencatat paling tidak ada sembilan tahap yang semestinya dilalui oleh inisiator kelompok untuk membangun kelompok yang mumpuni antara lain: (1) mengkonsepsi ide untuk membentuk kelompok, (2) mobilisasi atau penyadaran pada calon anggota, (3) pemusatan pada peserta yang interest, (4) deklarasi kelompok, (5) membuat cita-cita dan sasaran, (6) menjalankan petunjuk operasional, (7) mobilisasi sumberdaya, (8) perencanaan aktifitas kelompok, serta (9) implementasi aktifitas kelompok. Sebagai ilustrasi tentang tahapan pembentukan kelompok secara umum dapat dilihat dalam Gambar 4.

2. Strategi Implementasi

Secara umum untuk mendorong proses pembentukan kelompok yang "sebenarnya" sesuai dengan kaidah kelompok tidaklah mudah. Pendekatan top down selalu digunakan oleh pemerintah untuk mendirikan organisasi tani sejak jaman Orde Baru telah merusak esensi pembentukan kelompok. Pada akhirnya organisasi yang diharapkan mampu menjadi media petani untuk memperbaiki mutu produksi dan meningkatkan kesejahteraan mereka tidak tercapai (Hanani, 2002). Berdasarkan kondisi tersebut pengembangan organisasi tani yang lebih aspiratif menjadi penting untuk menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

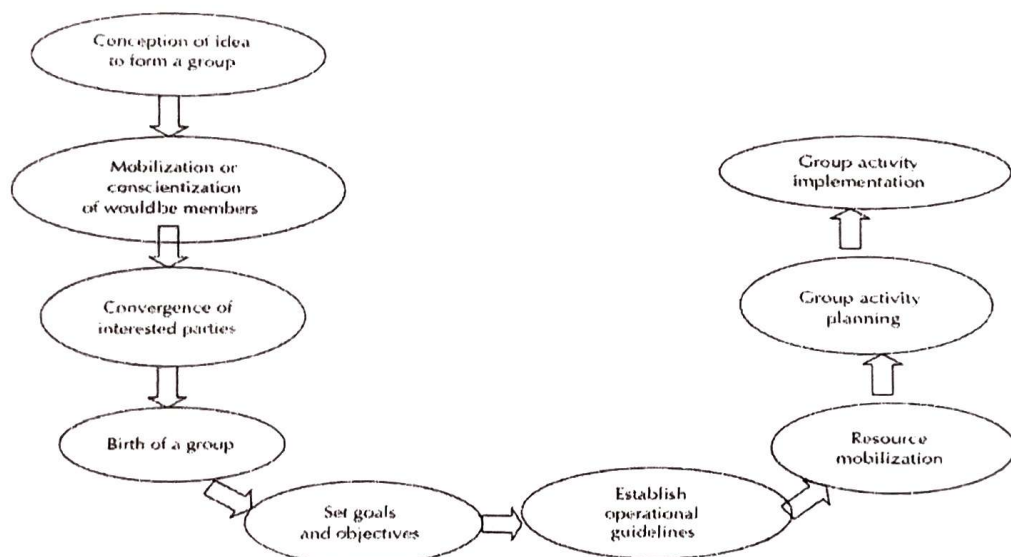


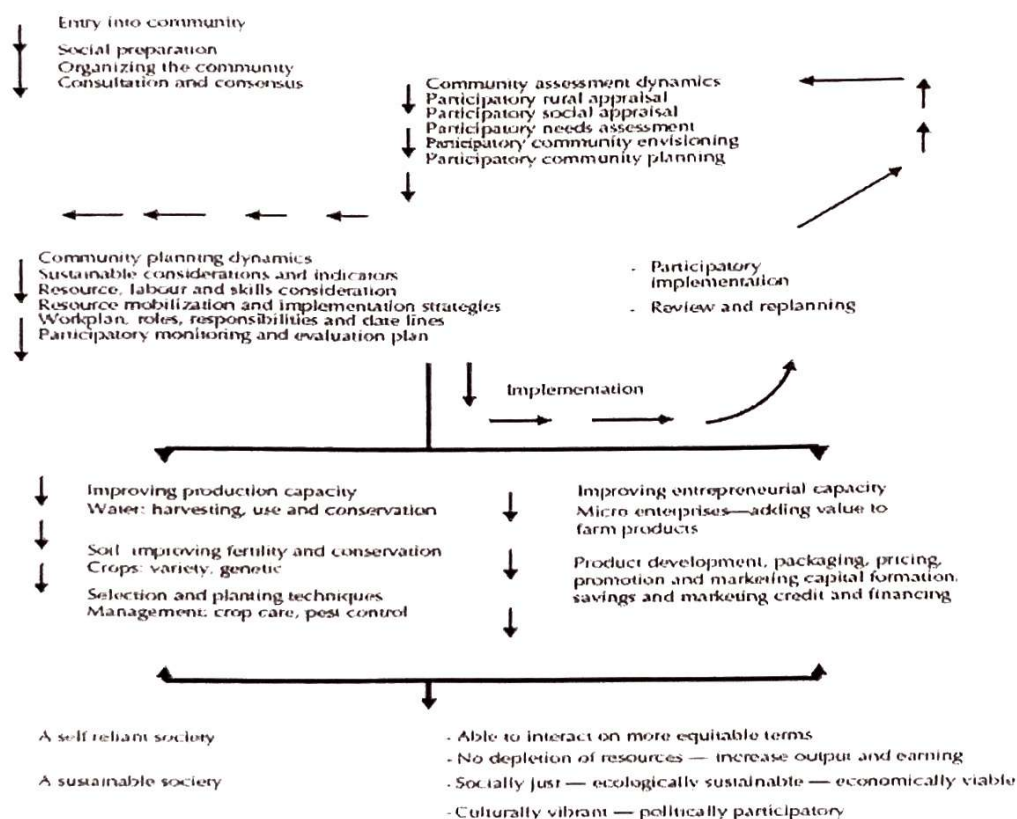
Figure 4.2. The group formation process.

Sumber: Ponnia dkk (2008)

Gambar 4. Proses pembentukan kelompok

Strategi implementasi pengembangan kelompok secara rinci dimulai dari proses masuk ke komunitas hingga kelompok mandiri. Anandajayasekeram Ponnia, dkk, 2008, mencatat proses pengembangan kelompok merupakan lingkaran aktifitas yang melibatkan proses perencanaan dengan sepenuhnya melibatkan komunitas serta proses implementasi hingga kelompok mandiri. Proses ini terjadi secara terus menerus dan proses yang tidak pernah berhenti. Sebagai ilustrasi proses pengembangan kelompok dapat dilihat dalam Gambar 5.

Gambar 5 menunjukkan bahwa pengembangan organisasi dimulai dengan proses memasuki komunitas, assesment komunitas, perencanaan komunitas, implementasi, dan proses review dan perencanaan ulang. Pada tahap memasuki komunitas, community organizer (CO) harus melakukan pengenalan sosial, mengorganisasi komunitas, serta melakukan konsultasi dan konsensus tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya pada tahap assesment, CO dapat melakukan *Participatory rural appraisal*, *Participatory social appraisal*, *Participatory needs assessment*, *Participatory community envisioning*, dan *Participatory community planning*.



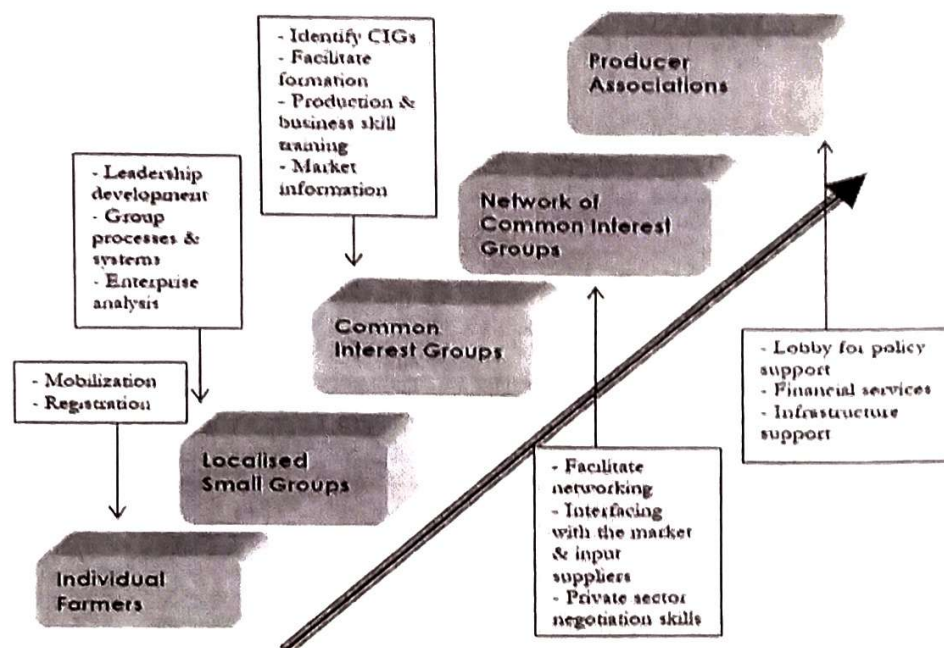
Sumber: Ponnia dkk (2008)

Gambar 5. Implementasi Pengembangan Kelompok

Pada tahap perencanaan, CO harus mampu membuat rencana terkait dua hal mendasar yakni peningkatan produktifitas baik kualitas maupun kuantitas serta peningkatan interpreneur kelompok. Peningkatan produksi terkait dengan teknologi budidaya seperti pengelolaan air, pengelolaan lahan, pemilihan bibit, serta usaha-usaha pendukung seperti pengelolaan hama dan pengelolaan tanaman. Sementara itu peningkatan interpreneur meliputi peningkatan nilai produk, pengembangan produk melalui diversifikasi, pengepakan, menjalin market, juga jaringan pembiayaan dan manajemen usaha.

Dari seluruh proses tersebut diharapkan sebuah kelompok mampu berinteraksi secara wajar dengan pihak-pihak lain dalam mengelola usahanya. Menjaga agar sumberdaya tidak berkurang dengan selalu meningkatkan hasil, menjaga keadilan sosial, keberlangsungan lingkungan, serta menambah nilai ekonomis hingga mampu mewujudkan kebudayaan yang hidup dan partisipasi politik secara aktif.

Seluruh aktifitas di atas pada dasarnya merupakan sebuah proses transformasi masyarakat dari sebelumnya terpecah-pecah pada unit-unit produksi kecil untuk ditransformasi pada unit produksi yang terkonsolidasi. Proses tersebut harus selalu dicatat oleh CO sehingga dapat teridentifikasi secara mendetail dimana sebenarnya proses pengorganisasian tersebut berada. Apakah pengorganisasian telah benar-benar mencapai tahap asosiasi sebenarnya atas proses produksi atau masih terpecah-pecah. Secara rinci ukuran pada tahap mana organisasi yang dikembangkan berada dapat dilihat dalam Gambar 6.



Sumber: Ann Stroud dkk (2006)

Gambar 6. Tahap konsolidasi produksi kelompok

PENUTUP

Pada dasarnya pengembangan kelompok tani merupakan aktifitas yang sangat penting bagi pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Namun demikian selama ini pengembangan kelembagaan tani sangat bias kelompok tani sehingga stake holder lain yang semestinya menjadi bagian integral dari pengembangan kelompok tani tidak tergarap. Selain keterbatasan dana dan waktu, pola pengembangan kegiatan yang masih terpisah-pisah antar elemen baik pemerintah, NGO, dan pelaku lainnya menjadikan komunitas pertanian kita bagaikan hutan lebat kelembagaan. Tiap kekuasaan berganti berganti pula kelembagaan yang dikembangkan.

Ada empat tahap perkembangan yang harus dilalui untuk membangun kelembagaan yang mapan yakni (1) Tahap inisiasi atau sensitization dan pembangkitan minat/kesadaran, (2) Tahap konsolidasi atau group formation, dan (3) Tahap penguatan institusi, dan (4) Tahap pengembangan institusi. Sementara itu inisiasi kelembagaan dapat dilakukan melalui tiga pola yakni : (1) patnership antara organisasi lokal (CBO) dan pemerintah daerah, (2) patnership antara organisasi lokal dengan NGO dan sektor swasta, (3) patnership langsung antara organisasi lokal dan pemerintah pusat.

Dikaitkan dengan proses learning circle masyarakat dimana kelembagaan menjadi bagian integral ada enam fase utama yang harus dilalui oleh CO untuk membangun kelembagaan yang mapan. Enam fase tersebut yakni (1) fase inisiasi perubahan, (2) fase pencarian cara baru, (3) fase perencanaan dan penguatan kapasitas organisasi lokal, (4) fase percobaan implementasi, (5) fase berbagi pengalaman, serta (6) fase refleksi serta perencanaan baru.

Sementara itu, untuk mengembangkan kelompok tani yang berbasis pada agro-interprise, maka kita perlu memetakan beberapa element penting yakni domain teknis yang diperankan oleh Lembaga teknis (Deptan) dan dari luar yang harus dibangun kerjasamanya. Ada empat peran yang dapat dikerjakan oleh lembaga teknis yakni mendorong pengembangan teknologi, memberikan pendampingan, mendorong pengembangan pasar, dan menggalang asosiasi produsen (petani). Sementara itu servis yang harus dibangun jaringannya dengan pihak lain adalah palayanan keuangan, infrastruktur, penciptaan lingkungan yang kondusif, serta penyiapan input yang dapat diakses.

Terkait dengan pengembangan kelompok, ada sembilan tahap yang semestinya dilalui oleh inisiator kelompok untuk membangun kelompok yang mumpuni antara lain (1) mengkonsepsi ide untuk membentuk kelompok, (2) mobilisasi atau penyadaran pada calon anggota, (3) pemusatan pada peserta yang interest, (4) deklarasi kelompok, (5) membuat cita-cita dan sasaran, (6) menjalankan petunjuk operasional, (7) mobilisasi sumberdaya, (8) perencanaan aktifitas kelompok, (9) implementasi aktifitas kelompok.

Untuk mencapai delapan tahap tersebut maka CO wajib melakukan proses memasuki komunitas, assesment komunitas, perencanaan komunitas, implementasi, dan proses review dan perencanaan ulang terus menerus. Seluruh aktifitas di atas pada dasarnya merupakan sebuah proses transformasi masyarakat dari sebelumnya terpecah-pecah pada unit-unit produksi kecil untuk ditransformasi pada unit produksi yang terkonsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burkey, S. 1993. *People First A Guide to Self-Reliant, Participatory Rural Development*, Zed Books, New York
- Chisholm, C. Rupert. 2006. *Action Research to Develop an Interorganizational Network*, dalam Reason P. dan Bradbury H., *Handbook of Action Research : the Concise Paperback Edition*, Sage Publications, London.
- Cohen & Uphoff. 1977. *Rural Development Participation*, Jakarta PT. Gramedia.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternatif Developoment*, Blackwell, Massachusetts
- Gani, A. Radi. 2002. *Kemandirian lokal menyongsong abad baru, dengan pendekatan pembangunan berbasis kemandirian lokal*, UNHAS Press, Makasar.
- Garkovich, L. E. 1989. *Local Organization and Leadership in Community Developoment*, dalam Christenson J., A., dan Robonson J., W., JR., *Community development in Perspective*, Iowa State University
- Hanani, N., J. Ibrahim, dan M. Purnomo. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian: Sebuah Ide Baru*, Laper, Jogjakarta.
- Kartodirdjo, S. dan D. Suryo. 1994. *Sejarah Perkebunan di Indonesia. (The history of plantation estate in Indonesia)* Kajian sosial ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.
- Keith, D. 1962, *Human Relation At Work*, Thoso Printing. Co. Ltd.
- Narayan, D. 2002. *Empowerment and The Proverty Reduction A Sourse Book*. The World Bank
- _____. 2006. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*. The World Bank, Washington DC.
- Ponnia, A, dkk. 2008. *Concepts and practices in agricultural extension in developing countries: A source book*, International Livestock Research Institute (ILRI), Addis Ababa, Ethiopia
- Purnomo, M. 2007. *Pembetukan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) partisipatif dalam pengembangan model pemasaran tanaman bunga di kota Batu*, AGRITEK vol. 15 NO. 4
- Stroud, A. *et al*., 2006. *Managing Change: Institutional Development under NAADS, A Field Study on Farmer Institutions Working with NAADS*, AFRICAN HIGHLANDS INITIATIVE
- Syahyuti. 2004. *Model kelembagaan penunjang pengembangan pertanian di lahan lebak*, makalah disampaikan pada Workshop nasional pengembangan lahan rawa lebak, BALITRA 11-12 Oktober 2004 di Banjar Baru dan Kandangan, Kalimantan Selatan.
- Tjahya, S. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

- Waring, M. 2004. Civil Society, Community Participation and Empowerment in the Era of Globalization, AWID (Asosiation of Women`s Rights in Development), Toronto, Canada.
- Vejpas, C. dkk. 2003. Participatory modeling for managing rainfed lowland rice varieties and seed system in lower northeast Thailand, Office of Agricultural Research and Development (OARD) IV, Ubon Ratchathani, Thailand